

ABSTRACT

Integrated coordination plays a crucial role in ensuring the successful implementation of programs and the achievement of organizational goals. Harmonized actions, effective communication, structured division of labor, and work discipline enable teams to carry out their main duties and functions efficiently and effectively. This study aims to examine the coordination among related agencies/OPDs (Regional Apparatus Organizations) in the structuring and regulation of street vendors (PKL) in the Tugu Keris Siginjai area, Kota Baru District, as well as to identify the supporting and inhibiting factors affecting the coordination process. The type and approach of the research used is descriptive qualitative. Data collection methods involve primary and secondary sources through observation, interviews, and documentation. Informants were selected using purposive sampling techniques. The results of the study indicate that coordination among related agencies/OPDs in the structuring and regulation of street vendors in the Tugu Keris Siginjai area has been mostly implemented, as evidenced by steps such as the formation of a coordination team based on Mayor Regulation No. 28 of 2016 concerning the mechanism for structuring and empowering street vendors, which refers to Jambi City Regional Regulation No. 12 of 2016. However, several challenges were still identified, including differences in opinion leading to miscommunication, limited socialization efforts, and the suboptimal implementation of enforcement processes, such as unsystematic notification schedules for enforcement activities and the absence of follow-up reports on the application of sanctions.

Keywords: *Coordination, Structuring, Regulation, Street Vendors*

INTISARI

Koordinasi yang terintegrasi memegang peranan penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan program dan pencapaian tujuan organisasi. Kesatuan tindakan, komunikasi yang efektif, pembagian tugas yang terstruktur, serta disiplin kerja memungkinkan tim koordinator untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing secara efisien dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Koordinasi Antara Instansi/OPD Terkait Dalam Upaya Penataan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Tugu Keris Siginjai, Kecamatan Kota Baru, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses koordinasi tersebut. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui sumber primer dan sekunder, yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemeilihan Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi/OPD dalam penataan dan penertiban PKL di kawasan Tugu Keris Siginjai sebagian besar telah berjalan, yang tercermin melalui langkah-langkah seperti pembentukan tim koordinasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Jambi No. 28 Tahun 2016 tentang mekanisme pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL, yang merujuk pada Peraturan Daerah Kota Jambi No. 12 Tahun 2016. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti perbedaan pendapat yang menyebabkan diskomunikasi, kurangnya intensitas sosialisasi, serta proses penertiban yang belum optimal, contohnya pemberitahuan jadwal penertiban yang tidak sistematis dan ketiadaan laporan lanjutan terkait penerapan sanksi.

Kata kunci: Koordinasi, Penataan, Penertiban, Pedagang Kaki Lima